



RABU, 24 OKTOBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemprov Temukan Aset Senilai Rp 5 Triliun

BENGKULU - Pemprov Bengkulu sudah mulai melakukan penyisiran terhadap aset-aset yang selama ini "amburadul" karena banyak yang tidak jelas keberadaannya dan administrasinya. Hasil penyisiran selama ini, telah ditemukan aset-aset milik Pemprov Bengkulu senilai Rp 5 triliun lebih, baik itu berupa aset bergerak seperti kendaraan maupun aset tidak bergerak seperti tanah.

☞ Baca **PEM PROV.** Hal 19

Sambungan dari hal 9

Ini disampaikan Sekda Provinsi Bengkulu H. Nopian Andusti, SE, MT saat menghadiri acara bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan barang milik daerah (BMD) berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Grage Hotel, kemarin (23/10).

"Kita sudah mulai penertiban aset. Aset yang terdaftar kemarin nilainya Rp 3,5 triliun lebih dan sekarang yang sudah kita temukan ternyata nilainya sekitar Rp 5 triliun lebih. Ini bukan berarti aset baru, tapi aset yang selama ini belum kita temukan dan baru sekarang kita temukan," ujar Nopian.

Dikatakan Nopian, dengan regulasi yang baru ini yakni Permendagri nomor 19 tahun 2016 lebih memudahkan pemprov dalam mengelola aset. Dan jika ada aset yang selama ini disalahgunakan atau berada tidak pada tempatnya, itu bisa masuk dalam kategori penggelapan

(pidana, red).

"Oleh karena itu hati-hati dalam meminjamkan, dalam menggunakan dan juga dalam melakukan inventarisir terhadap barang milik daerah karena aturannya sangat tegas dan kuat," terang Nopian.

Apa saja aset-aset yang ditemukan senilai Rp 5 triliun itu? Nopian belum bisa menyebutkan beberapa diantaranya. Ia hanya menyebutkan berupa tanah dan aset-aset bergerak lainnya.

"Rata-rata tanah. Untuk tanah, yang mana yang belum bersertifikat akan kita sertifikatkan. Yang pasti kita terus melakukan penyisiran terhadap aset-aset kita yang selama ini belum diketahui atau beberapa aset yang belum terungkap. Ini adalah barang milik daerah, bukan milik pribadi. Kita pastikan semuanya harus terdata," tegas Nopian.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Heru Susanto mengakui selama ini memang masalah aset di Pem-

prov Bengkulu amburadul atau semrawut. "Kalau kita lihat sejak tahun 2000 sampai 2012, memang permasalahan yang berkaitan dengan manajemen aset ini luar biasa. Aset milik publik nilainya triliunan dan banyak sekali dibanding aset milik suatu korporasi. Manajemen aset ini jadi pengaruh untuk meraih WTP," kata Heru.

Dikatakannya, BPKD menyadari masih banyak lahan pemprov yang kenyataannya belum bersertifikat bahkan ada yang dikuasai oleh masyarakat. Bahkan ada yang sudah didirikan bangunan rumah dan diperjual belikan. Kemudian banyak juga aset-aset yang tercatat tetapi fisiknya tidak tampak.

"Untuk lahan yang ditempati oleh masyarakat, kita utamakan pendekatan secara persuasif. Bila tidak bisa, kita minta kawal dari aparat penegak hukum (APH) dan TNI sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan pada saat kita ingin menertibkan aset," demikian Heru. (tew)